



## Aktivis Terdidik Dalam Pusaran Politik Lahan dan Gerakan Agraria di Abad 21

*Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.*

Margaret Mead

*“On researching the deeply political, inherently messy issues of social justice land policies [it is] difficult but necessary to ask big and act insurgent...one of the most effective, relevant approaches for academics is to do research on these issues from a scholar-activist tradition but this means more complicated and difficult ways of doing research. But it can be complementary to other approaches – and can be quite rewarding academically and politically”*

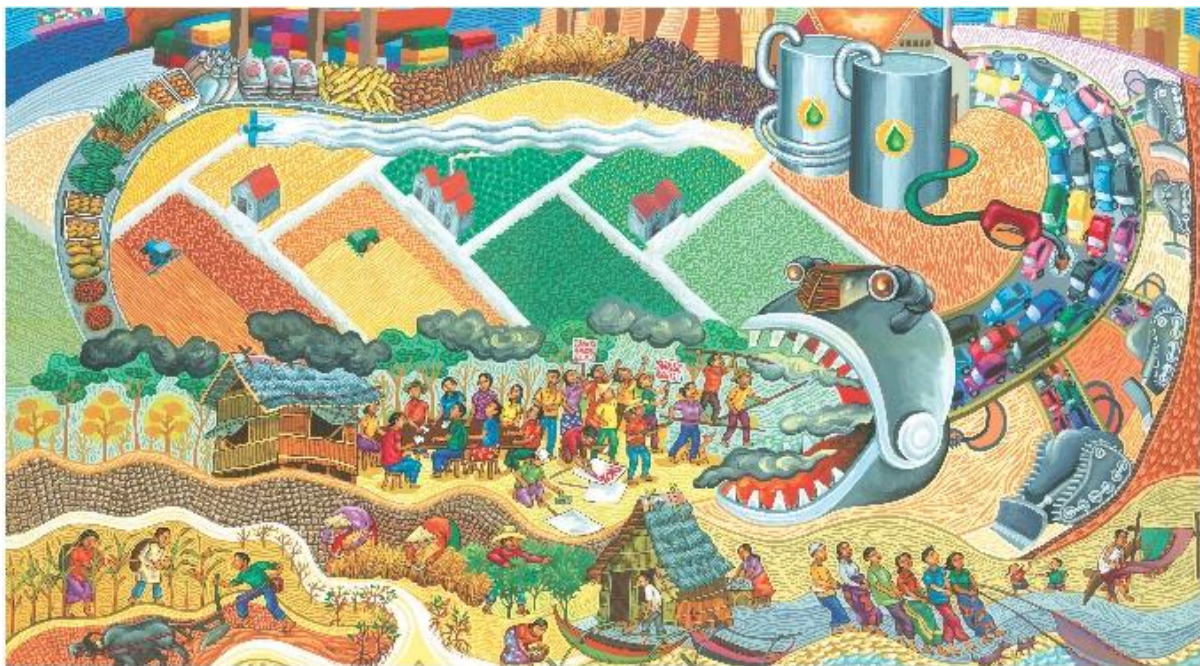
Sarturnino (Jun) Boras

Memasuki awal abad ke 21 ini agenda politik lahan dan gerakan agraria pada skala global-lokal menghadapi tantangan-tantangan baru. Meroketnya kebutuhan akan komoditas-komoditas tertentu yang membutuhkan lahan dengan jumlah besar sebagai situs produksinya menandai awal dari proses transformasi agraria yang terjadi. Dorongan ekspansif ini dibarengi oleh perubahan pada pola-pola politik lahan dan gerakan agraria yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Gejala-gejala perubahan dan transformasi agraria ini menjadi perhatian Professor Saturnino “Jun” Boras Jr. ahli dibidang studi agraria yang berasal dari Institute of

Social Studies (ISS) di Den Hag, Belanda. Dalam kuliah seri #2 Pusaka Agraria Jun Boras melihat bahwa perebutan sumber daya alam yang terjadi secara global terkait dengan sumber-sumber agraria seperti tanah, air dan yang lainnya membawa beberapa konsekuensi.

*Pertama*, fenomena yang dikenal sebagai *Global Land Rush* atau perburuan tanah global memiliki mekanisme-mekanisme yang dapat berdampak pada krisis ditingkat pedesaan. Perburuan lahan dalam skala global menggunakan mekanisme pengusiran (*expulsion*), ancaman akan adanya pengusiran, rekonsentrasi lahan dan inkorporasi lahan mendorong terjadinya proses marginalisasi dan pemisahan sumber-sumber kehidupan para petani di tingkat pedesaan. Ancaman krisis pedesaan dalam konteks global ini menjadi tantangan karena setengah dari populasi di dunia masih berada di pedesaan dan bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupannya.

*Kedua*, gelombang pasang perburuan lahan yang menghantam pedesaan terhubung dengan berbagai krisis agraria pada skala yang lebih besar. Pada sisi lain proses urbanisasi yang terjadi menciptakan kebutuhan atas makanan yang meningkat di perkotaan. Perubahan tata guna lahan untuk produksi komoditas juga memicu kerusakan alam. Ikatan kolektif pedesaan dan masyarakat adat mengalami pergeseran akibat dirombaknya relasi sosial ditingkat lokal. Krisis pangan, krisis iklim dan krisis sosial budaya masyarakat yang ruang hidupnya mengalami ancaman perburuan lahan mendorong konflik-konflik agraria baru. Semua ragam permasalahan dan krisis ini bermuara pada perubahan agraria yang terjadi pada awal abad ini.



*Ketiga*, pola politik agraria saat ini tidak hanya melibatkan agensi negara dan korporasi besar namun pada prakteknya memunculkan *individual oportunist*s atau individu-individu serta kelompok pada aras lokal yang melihat adanya potensi keuntungan untuk ikut terlibat. Makelar-makelar tanah, spekulasi tanah, penipu, pencuri dan bahkan kelompok sipil paramiliter masuk dalam pusaran perburuan lahan secara ekspansif ini. Keterlibatan aktor non negara dan korporasi ini terlepas dari jangkauan radar sistem serta lembaga internasional dan kerangka formal. Pada saat bersamaan gerakan populisme yang memobilisasi politik identitas muncul dari kalangan elit politik di berbagai negara sebagai respon dari krisis ekonomi dunia dalam tingkat global. Mereka yang mengalami proses marginalisasi melalui pemisahan dari sumber-sumber agraria seringkali terbawa oleh tawaran-tawaran populisme tersebut.

Perubahan agraria diawal abad ke 21 ini membangkitkan minat para akademisi untuk mengkaji dan mengaktifkan kembali bidang studi kajian agraria kritis. Salah satu perhatian kalangan akademi studi agraria terhadap proses transformasi agraria ini adalah dampak politik terutama politik agraria. Setidaknya terdapat enam dampak yang diidentifikasi melalui kajian-kajian agraria yang ada;

1. Menguatnya pandangan ‘monetaris’ yang melihat secara tunggal kepentingan ekonomi atas tanah melalui efisiensi dan kegiatan ekstraktif. Pandangan ini cenderung tidak memperhatikan bahwa ada dimensi lain atas tanah selain dimensi ekonomis;
2. Adanya penguatan kelas pemilik tanah dan aliansi pemerintah dan pengusaha;
3. Pandangan modernis didalam lembaga-lembaga negara yang ramah pada kegiatan ekstraksi agraria dan melemahnya peran kelembagaan dalam memperkuat reformasi berdasarkan keadilan sosial;
4. Berlanjutnya proses marginalisasi petani-petani kecil dan kelompok lainnya di daerah pedesaan dan pedalaman;
5. Munculnya ketegangan antar etnis yang lama dengan munculnya konflik baru;
6. Terpinggirkannya sistem reformasi sosial karena dianggap tidak sesuai kebutuhan dan penyesuaian agenda-agenda riset akademik dan masyarakat sipil terhadap kecenderungan yang ada.

Jun Boras melihat isu lahan kontemporer terkait dengan beberapa kategori geografis. Kategori yang terpenting adalah pedesaan-pertanian karena terkait dengan banyaknya masyarakat miskin di pedesaan. Kondisi masyarakat pedesaan di negara-negara Utara dan negara-negara Selatan berbeda terutama pada nilai budaya dalam memandang tanah. Ini berimplikasi pada memberlakukan tanah sebagai komoditas berikut dengan penilaian ekonomisnya. Salah satu dampak terbesar dari problem politik lahan pada kategori ini adalah menurun dan hilangnya aktivitas pemuda dalam kegiatan pertanian. Pada kategori pedesaan-non pertanian, isu perubahan iklim dan kebijakan terkait seperti konservasi neo-liberal merupakan bentuk strategi yang kerap diambil pemerintah. Akibatnya kebijakan tersebut juga mengancam wilayah hidup pedesaan. Masalah lain yang timbul adalah perubahan demografis akibat penetrasi kapital yang mengaburkan hubungan desa-kota.

Land	South	North
Rural/agricultural (I)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rural/non-agricultural (II)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urban/agricultural (III)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urban/non-agricultural (IV)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Permasalahan lahan tidak hanya terjadi diwilayah pedesaan. Kota sebagai ruang bagi konflik lahan terkait pertanian dan non pertanian juga menjadi isu yang mengemuka belakangan ini. Di wilayah kota, pertanian kota merupakan kegiatan yang jarang diminati karena banyak anak muda perkotaan lebih berorientasi pada kegiatan yang menguntungkan dan pertanian dianggap kurang menarik. Masalah pertanian di wilayah perkotaan juga terkait dengan terbatasnya lahan sehingga teknologi dan inovasi dibutuhkan. Kegiatan-kegiatan dan aktivitas perkotaan non pertanian juga sangat membutuhkan lahan, terutama ruang untuk taman kota dan area untuk gedung-gedung perkantoran dan apartemen. Meski begitu, Boras mengingatkan kita pentingnya menjadikan gerakan pertanian kota sebagai bagian dari gerakan pembaruan agraria.

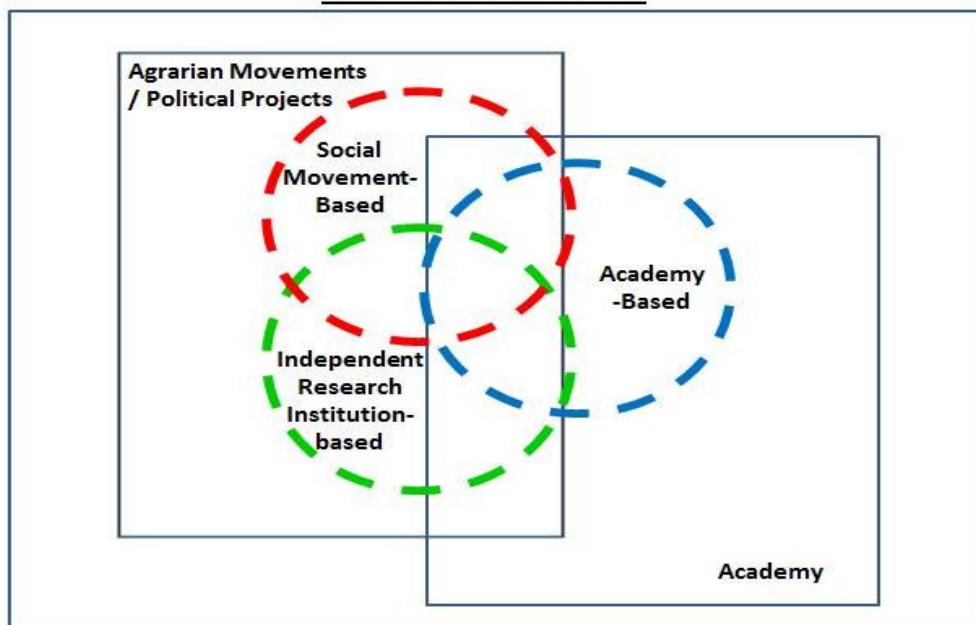
Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam melihat permasalahan lahan kontemporer yang terjadi di desa-kota saat ini adalah dengan melihat kemungkinan untuk kembali memperkuat kegiatan produksi di wilayah pedesaan. Krisis kebutuhan pangan yang mulai

muncul di perkotaan misalnya dapat diatasi dengan memperkuat produksi pertanian di wilayah pedesaan. Pokok utama yang harus dilakukan adalah mereorganisasi sistem industri pangan yang ada saat ini – yang menyebabkan proses penyingkiran petani sebagai produsen utama dan hubungannya dengan alam (tanah). Salah satu yang mendorong terjadinya proses urbanisasi adalah mobilitas orang pedesaan yang kehilangan akses terhadap tanah garapan untuk subsistensi mereka. Selain kelebihan hasil subsistensi tersebut dapat menyokong kebutuhan pasar atas pertanian. Dengan solusi ini misalnya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kemiskinan di desa, mengurangi mobilitas orang pedesaan menuju perkotaan, dan meningkatkan produksi untuk mengatasi kemiskinan dan menyumbang kebutuhan orang perkotaan akan pangan.

Ditengah situasi kontemporer agraria ini, Jun Boras melihat masih ada jalan alternatif yang dapat ditempuh yaitu dengan mereformasi sistem secara mendalam dan multi dimensional (politik, ekonomi, budaya dan ekologi) yang berlandaskan pada perspektif keadilan sosial. Jalan yang ditempuh dalam perspektif keadilan sosial ini melibatkan dua hal yaitu tawaran tata kelola lahan serta kebijakan dengan orientasi reforma agraria yang mendukung pemulihan kondisi pedesaan dan positionalitas *aktivis terdidik* dalam agenda riset berorientasi keadilan sosial.

Tata kelola dan kebijakan lahan berorientasi keadilan sosial berlandaskan formula azas R-R-R atau *Rekognisi-Redistribusi-Restitusi* lahan. Program keadilan sosial berazas *Rekognisi* yaitu melindungi dan menghargai hak-hak akses atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang atau kelompok melalui berbagai kebijakan seperti hak kedaulatan teritorial, etnik dan kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan gender serta antar generasi. *Redistribusi* mempromosikan dan mendukung orang atau kelompok yang berkeinginan untuk menggarap tanah tetapi tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber agraria. Redistribusi dapat ditempuh melalui kebijakan seperti reformasi lahan dan relokasi tanah hutan. Sedangkan Restitusi adalah upaya kebijakan untuk memulihkan mereka yang pernah dipisahkan dari tanah dan sumber-sumber agraria lainnya untuk kembali memiliki akses. Ketiga kebijakan lahan ini merupakan kerangka keadilan sosial yang dapat digunakan untuk tata kelola lahan.

### Scholar-Activists



Aktivis terdidik dan ilmuwan memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan agenda tata kelola lahan perspektif keadilan sosial. Salah satu harapan bagi mereka yang mengalami penyingkiran dari akses sumber agraria terletak pada sekelompok orang yang peduli dengan keadilan sosial. Disini berbeda dengan agensi negara, perusahaan dan *individual oportunist* yang kerap menciptakan lingkaran janji yang tidak dapat dipenuhi, peran *aktivis terdidik* adalah memperbaiki (*repairing*) hubungan manusia dengan (alam) sumber agrariannya. Disini peran agensi *aktivis terdidik* adalah menyeimbangkan kekuatan dengan cara memfasilitasi kemunculan gerakan keadilan sosial disaat terjadi kekosongan, memperkuat gerakan pro keadilan sosial disaat dalam kondisi lemah dan membantu agar apa yang telah tercapai dapat lebih dikembangkan. Selain itu *aktivis terdidik* berusaha mendorong terciptanya keseimbangan diantara ketimpangan yang terjadi antara aktor negara, perusahaan dan komunitas yang terkena dampak dari perburuan tanah.

Seorang *aktivis terdidik* berada pada ruang antara yang menjembatani kegiatan akademiknya melalui penelitian dan aktivisme dalam memperkuat (*empowering*) komunitas dan gerakan agraria yang dibelanya. Perspektif keadilan sosial menjadi landasan dan sekaligus tujuan yang mempersatukan dua jenis kerja (akademik dan aktivis) yang memiliki tensi dan tekanan berbeda. Melalui penelitian dan pengalaman dilapangan dalam memperjuangkan keadilan sosial, *aktivis terdidik* dapat berkontribusi merumuskan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk pengambil kebijakan terkait tata kelola lahan dan agraria. Dengan kata lain, transformasi agraria yang terjadi pada awal abad 21 ini memanggil mereka yang memiliki kesadaran keadilan sosial untuk masuk kedalam pusran politik lahan dan agraria dalam agensi sebagai *aktivis terdidik*. Sebuah panggilan tanah-air dan manusia yang dipisahkan darinya.

Penulis : Fathun Karib